BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Rawang Painan Utara dalam memberikan pengawasan pada Organisasi Pemerintah Nagari masih bekerja dengan fungsinya tetapi masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat kurang maksimal dalam melakukan tugasnya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Rawang Painan Utara dalam menjalankan pengawasan terhadap Organisasi Pemerintah Nagari.
 - d. Laporan pertanggung jawabannya tidak sesuai.
 - e. Badan Usaha Milik Nagari sudah tidak beroperasi.
 - f. Badan usaha Milik Nagari dalam bentuk pribadi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat rawang Painan Utara dalam memberikan pengawasan adalah
 - a. Meminta pertanggung jawaban Wali Nagari.
 - b. Menindak tegas oknum masyarakat.
 - c. Melakukan pengawasan.

B. Saran

1. Agar Badan Usaha Milik Nagari di gunakan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
2. Agar pemerintah Daerah Pesisir Selatan lebih memperhatikan pengurus Badan Usaha Milik Nagari, dan memperhatikan masyarakat yang tidak jujur dan yang banyak merugikan berbagai pihak di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Agar keberadaan Badan Usaha Milik Nagari di pergunakan sesuai dengan fungsinya, tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau tempat maksiat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adisasmita, 2010, "*Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*" Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anugerah Ayu Sendari, 2023, "Faktor Penyebab Korupsi, Lengkap Dengan Teori Dan Jenisnya" Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2005, *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, 2015, "*Teknik, Struktur, dan Model Penerapan*" Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- M. Maryunani, 2008, "*Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*," CV Pustaka Setia.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW, 2008, "*Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam rangka Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*" Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. SUMBER LAIN

- Ahmad Ismail, Eja Armaz Hardi, and Firmansyah Noor, 2022, "Analisis Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada PDAM Tirta Batanghari)," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* Volume 1, Nomor 4.
- Ahmad Mustanir, "Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif.
- Beahiwarta dan rahayu, 2014, *Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Government terhadap Pencegah Kecurangan pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 9, Nomor 1.
- Besse Herlina, Zulfachry, Sumarni, Syamsiar, 2023, "Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo" *Journal on Education*, Volume 05, Nomor 04.
- Fajrin Diatul, 2018, "Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (bumnag) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Nagari sungayang)" (Skripsi, IAIN Batusangkar).
- Jesica Angel, 2024, Etika dan Integritas Pilar Utama Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kampus, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume. 1, Nomor. 4.
- Jojo Juhaeni, 2021, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Konstituen* Volume 3, Nomor 1.
- Maulida Ulfa, 2019, "Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)" (*Thesis, Universitas Medan Are*.
- Nira, M. Jarnawansyah, 2022, "Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kabupaten Sumbawa" *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, Volume 4, Nomor 1.
- P.L Rika Fatimah, 2018 "Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur" *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 7 Nomor 2.

Suamperi, 2022, “Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Jurisprudencia* " Volume 5 Nomor. 1.

Tiara Cristi, 2021, “Peran Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Panampuang Saiyo Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Nagari Panampuang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam” (*PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).

Yulia Risa, Engrina Fauzi, and Jelisy Putri Cenery, 2019 “Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.,” *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4 Nomor 2..